

EVALUASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

Banyumas Masih di Bawah Standar LKPP

CALEG DPRD PURBALINGGA PDIP Raih Suara Terbanyak

PURBALINGGA (KR)

- Hasil rekapitulasi perolehan suara caleg DPRD Purbalingga memunculkan komposisi 50 calon anggota DPRD Purbalingga periode 2024-2029. Dari komposisi tersebut, terdapat 10 nama yang meraih suara terbanyak. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga menempatkan Bambang Irawan sebagai caleg PDIP dengan perolehan suara tertinggi, yakni 16.581 suara.



KR-Toto Rasmanto

Bambang Irawan

"Perolehan suara tertinggi juga diraih Bambang Irawan pada Pemilu 2019 lalu, yakni 10.013 suara. "Ini berkat dukungan dari konstituen dan juga segenap jajaran pengurus dan kader PDIP," kata Bambang Irawan yang juga Ketua DPC PDIP Purbalingga, Rabu (28/2).

Calon anggota DPRD Kabupaten Purbalingga itu berada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Bojongsari dan Kutasari. Bambang dibayangi Adi Yuwono caleg Partai Gerindra di Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Kaligondang, Pengadegan dan Kejobong, yang meraih 13.750 suara.

Seperti halnya Bambang Irawan, dalam struktur partai, Adi Yuwono yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Purbalingga. Di urutan ketiga, terdapat nama Tenny Juliawati caleg sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga. Caleg di Dapil 1 (Kecamatan Purbalingga, Bukateja dan Kemangkong) tersebut meraih 11.105 suara. Di urutan keempat, caleg PDIP Dapil 2 Dewi Wijayanti meraih 9.176 suara. Peringkat kelima caleg PKB Dapil 2 Sabila Rizki Febriana dengan perolehan 8.664 suara.

Peringkat keenam caleg Gerindra Dapil 2 Yuniarti SH (8.136 suara). Peringkat ketujuh diperoleh caleg PKB Aman Waliyudin di Dapil 1 (7.459 suara). Urutan kedelapan caleg PDIP Karseno di Dapil 4 (Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Kertanegara dan Karanganyar) dengan perolehan 7.416 suara. Urutan sembilan caleg Partai Gerindra Dapil 1 Mugi Wahyudi (7.756 suara), dan urutan 10 caleg PDIP Dapil 2, Tongat dengan 7.197 suara.

"Dari 10 caleg dengan perolehan suara terbanyak, empat di antaranya dari PDIP," ujar Bambang Irawan. Dalam Pemilu 2019, PDIP meraih 10 kursi legislatif. Pada 2024, partai banteng moncong putih itu optimis meraih 14 kursi.

(Rus)-d

BANYUMAS (KR) - Dari hasil evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Pemkab Banyumas dalam belanja produk dalam negeri masih di bawah standar LKPP.

"Berdasarkan evaluasi LKPP, realisasi belanja produk dalam negeri Pemkab Banyumas baru 43,57 persen," kata Kepala LKPP, Hendrar Prihadi usai Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Kamis (29/2) di Pendapa Si Panji Purwokerto.

Sosialisasi diikuti 376 orang dari OPD Pemerintah Kabupaten Banyumas. Mereka terdiri 23 camat, 301 kades se-Banyumas, dan asosiasi UMKM. Tujuan sosialisasi untuk memberikan bekal dalam pemahaman

dalam pengadaan barang dan jasa di desa.

Menurut Hendrar, realisasi belanja produk dalam negeri seharusnya sesuai standar LKPP, minimal realisasi produk dalam negeri harus 95 persen. Berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut, Hendrar minta kepada Pemkab Banyumas untuk memperbaiki pembelajaran barang produk dalam negeri. "Dari serangkaian evaluasi, ada daerah yang harus diperingatkan, salah satunya adalah Banyumas. Ditingatkan dalam konteks supaya sesuai aturan," ungkapnya.

Hendrar Prihadi juga mengingatkan agar Kabupaten Banyumas membuat laporan yang teliti, baik dan benar, karena berdasarkan data 'Rapor Banyumas' ba-

ru 43,57 persen realisasi belanja produk dalam negeri. Adapun target minimal realisasi produk dalam negeri adalah 95 persen.

Hendrar menduga, kemungkinan ada kekeliruan pencatatan atau Pemkab Banyumas belum melaporkan realisasi belanja produk dalam negeri yang sesungguhnya.

Tidak mungkin hanya 43 persen pembelian produk dalam negeri di Banyumas. Ia mencontohkan, untuk pembangunan jalan, semua produk lokal. Untuk itu, kedepan Pemkab Banyumas diminta membuat laporan yang baik dan benar.

Menurut Hendrar, selain realisasi belanja produk dalam negeri yang rendah, keterlibatan UMKM Koperasi juga baru 34,07 persen

dari minimal 40 persen. "Termasuk transaksi katalog, belum memenuhi standar minimal," jelasnya.

Disebutkan, E-Katalog tidak sulit, selama ada ke-mauan, misalkan penguatan jaringan WIFI. (Dri)-d



KR-Driyanto

Hendrar Prihadi

ALOKASIKAN ANGGARAN DARI APBD 2024

Pemkab Sukoharjo Serious Rehab RTLH

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo menjalankan program prorakyat membantu warga miskin dengan mengalokasikan bantuan rehab sebanyak 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari APBD 2024.

Anggaran telah disiapkan dan database RTLH sudah ada. Selanjutnya tinggal menentukan warga miskin penerima bantuan dengan melibatkan pihak pemerintah desa.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahyono mengatakan, bantuan rehab RTLH masih bisa bertambah dari sumber lainnya, seperti dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan CSR Bank Jateng. "Pemkab Sukoharjo sangat serius membantu warga mis-

kin atau kurang mampu salah, satunya terkait rehab RTLH," tandasnya, Kamis (29/2).

Menurutnya, sejak awal Januari 2024, Bupati Sukoharjo Etik Suryani sudah turun langsung mengantar bantuan rehab RTLH dengan mendatangi rumah warga berkeliling kampung. Bantuan tersebut bersumber dari Baznas Sukoharjo. Bantuan rehab RTLH dari Baznas Sukoharjo terus berjalan sejak Januari hingga Februari 2024. "Bantuan tersebut sengaja dijalankan awal karena proses yang lebih cepat dan mu-

dah," jelas Lanjar.

Pemkab Sukoharjo melalui APBD tahun 2024 juga sudah mengalokasikan bantuan rehab 100 unit RTLH untuk warga miskin. Rencananya setiap warga miskin akan menerima bantuan sekitar Rp 15 juta perunit RTLH. Saat ini masih tahap persiapan, dengan melihat database RTLH dan melibatkan pemerintah desa. Setelah siap, akan dilakukan tahapan sosialisasi, pencairan dana bantuan, dan pelaksanaan rehab RTLH.

Lanjar menyebutkan, berdasarkan Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 2021 terdapat 10.773 unit RTLH. Pada Tahun 2022 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Dana Desa,

CSR Bank Jateng dan Baznas Kabupaten, Sukoharjo menangani 1.355 unit RTLH. Sampai akhir tahun 2022 masih tersisa 9.936 unit RTLH yang belum tertangani. "Tahun 2023, melalui berbagai sumber pendanaan, Pemkab Sukoharjo menangani 1.661 unit RTLH. Tercatat hingga akhir 2023 tinggal tersisa 8.275 unit RTLH yang belum tertangani.

DPKP Sukoharjo berharap angka RTLH setiap tahun bisa turun, mengingat penanganan RTLH dilakukan secara merata di semua wilayah Kabupaten Sukoharjo. "Bupati Sukoharjo selalu turun langsung menyerahkan bantuan RTLH kepada warga penerima. Ini wujud nyata Pemkab Sukoharjo membantu masyarakat," tandas Lanjar Budi Wahyono.

(Mam)-d

HUKUM

Dua Pembunuh Tamu 'Home Stay' Ditangkap

SEMARANG (KR) - Misteri pembunuhan terhadap Ilham (23) tamu 'home stay' Jalan Kartini II Semarang akhirnya terungkap dengan ditangkap 2 tersangka oleh petugas Polrestabes Semarang. Kedua tersangka yakni Yog (20) dan MD alias Bangor (18) yang dibekuk di Demak.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kumpul Andika Dharma Sena, Kamis (29/2), menjelaskan kedua tersangka setelah terjadi peristiwa berdarah justru kebingungan. Apalagi mengetahui korban yang sudah dikenalnya menemui ajalnya dengan tubuh dihias luka bacokan.

Untuk menghilangkan jejak, kedua tersangka sempat melarikan diri ke Yogya, Solo, Salatiga hingga terakhir dibekuk di tempat persembunyian di Demak. Keduanya saat digrebek gagal melarikan diri karena kaki mereka sama-sama tertembus peluru petugas.

Seperti diberitakan KR, baik kedua tersangka dan korban sebelum peristiwa berdarah berkumpul di depan penginapan. Mereka minum minuman keras. Namun, tidak lama kemudian mereka terlibat keributan.

Ilham yang terdesak mencoba menyelamatkan diri dengan berlari. Tapi dikejar tersangka bersenjata tajam. Akhirnya Ilham tak berdaya setelah mengalami luka bacokan di pinggang kiri serta kepala bagian belakang.

Selain, Ilham, juga ada korban lain yakni Rizki. Rizki yang mencoba meleraikan, na-

mun terkena tusukan senjata tajam lolos dari maut. Keduanya oleh rekan lain dengan mobil online dilarikan ke RSUD dr Kariadi Semarang.

Polisi mengetahui peristiwa tragis tersebut setelah mendapat informasi dari pihak rumah sakit. Mengenai latar belakang pengeroyokan merenggut nyawa Ilham diduga balas dendam. Guna mengetahui pasti penyebab peristiwa berdarah itu masih terus didalami penyidik.

Dengan terbongkarnya kasus berdarah menimpa Ilham, maka latar belakang sejarah hitam kedua tersangka yang masih remaja terbongkar.

Kanit Resmob Polrestabes Semarang AKP Ardi Kurniawan, mengungkapkan Yog pernah dua kali divonis bersalah atas kasus pengeroyokan. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 2019 yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Yog diganjar hukuman ringan tidak kurang satu tahun penjara. Pada tahun 2022, Yog terlibat kasus serupa. "Tersangka Yog dua kali menjadi residivis, menjalani hukuman sekitar 1 tahun pada tahun 2019 dan ia pada tahun 2022 terlibat kasus serupa aksi pengeroyokan," jelas Ardi.

Sedangkan tersangka Bangor pernah terlibat kasus pengeroyokan dan dihukum. Bangor saat itu berusia 17 tahun sempat ditahan di panti rehabilitasi Antasena Magelang. Selama ditahan, Bangor dua kali melarikan diri dan tertangkap.

(Cry)-d



KR-Karyono

Dua tersangka Yog dan MD alias Bangor mengalami luka tembak.

PELAKU MUTILASI DIHUKUM MATI

Hakim : Tak Ada Hal yang Meringankan Terdakwa

SLEMAN (KR) - Dua pelaku pembunuhan mutilasi, yakni Waliyin (29) dan Ridduan (38) divonis hukuman mati oleh majelis hakim PN Sleman, Kamis (29/2).

Majelis hakim dengan Ketua Cahyono dan hakim anggota Edy Hantono serta Hernawan, menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindakan pembunuhan berencana pada korban mahasiswa UMY, Redho Tri Agustian (20), dengan jeratan pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Putusan tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana," jelas Cahyono saat membacakan putusan.

Ditegaskan, perbuatan kedua terdakwa yang membunuh dan memutilasi korban adalah keji dan tidak berperikemanusiaan, sehingga tidak ada hak bagi keduanya mendapatkan keringanan hukuman. "Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat serta mening-

galkan duka mendalam bagi keluarga korban. Tidak ada hal yang meringankan," tegas Cahyono.

Hakim menyebutkan para terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf pada keluarga korban, namun keluarga korban tidak memaafkan.

"Perwakilan keluarga korban tetap menuntut para terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena telah melakukan pembunuhan keji tidak berperikemanusiaan pada terdakwa korban Redho Tri Agustian," jelas Cahyono.

Majelis hakim juga memerintahkan kedua terdakwa tetap ditahan sebelum dijatuhi eksekusi hukuman mati dan menepatkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Atas putusan ini, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sikap yang sama juga dilakukan JPU. Seperti diberitakan se-



KR-Istimewa

Dua terdakwa mendengarkan pembacaan vonis dari majelis hakim.

belumnya kedua terdakwa dan korban berada dalam satu komunitas Bondage Dominance, Sadism, dan Masochism (BDSM) di grup Facebook. Dalam BDSM ada yang berperan sebagai master yang melakukan dan slave sebagai penerima.

Sebelum kejadian, dari rumahnya di Jakarta terdakwa Ridduan ke Yogya pada 7 Juli 2023 dan kemudian bermain BDSM di kos Waliyin di Sleman. Ridduan menjadi master dan Redho menjadi slave.

Namun dalam bermain BDSM korban yang mene-

rima pukulan-pukulan Ridduan terjatuh dan tak berdaya. Karena panik korban tidak bernyawa lagi, kemudian Waliyin mengusulkan mutilasi pada korban untuk menghilangkan jejak.

Potongan tubuh korban pertama kali ditemukan pada 12 Juli 2023 malam di Sungai Bedog Padukuh-an Kelor Bangunkerto, Turi Sleman. Setelah polisi melakukan penapisan pada Sabtu (15/7) ditemukan potongan lain tubuh korban yang dikubur di dekat Sungai Krasak Tempel.

(Vin)-d

TERHALANG PENYAKIT DALAM

Mantan Kades Gedongan Belum Ditahan

KARANGANYAR (KR) - Tim penyidik Kejari Karanganyar meminta keterangan 13 saksi kasus dugaan penyelewengan tanah kas desa Gedongan Colomadu. Saat ini, mantan Kades Gedongan, Tri Wiyono, sudah ditetapkan tersangka namun belum ditahan.

Kasi Pidwas Kejari Karanganyar, Hartanto, mengatakan berdasarkan hasil rekam medik, Tri Wiyono menderita sakit ginjal stadium dua. Hal itu yang menghambat penahanan karena tersangka harus berobat rutin ke rumah sakit. Disebutkan, perkembangan kesehatan tersangka terus dipantau.

Sementara itu terkait kasusnya, para saksi diperiksa secara maraton. Mereka dari kalangan perangkat Pemerintah Desa Gedongan, Dispermasdes dan penyewa lahan di tanah kas Desa Gedongan.

Tersangka Tri Wiyono dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU tindak pidana korupsi. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 400 juta.

Hartanto menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, tersangka Tri Wiyono diduga melakukan proses lelang tanah bengkok tidak sesuai dengan prosedural serta jangka waktu lelang lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 10 tahun saat menjabat Kades.

Menurut Hartanto, tidak hanya tanah bengkok milik Kades yang disewakan tidak sesuai dengan prosedur. Tanah milik perangkat desa juga disewakan, tanpa prosedur baku. Kades tersebut kemudian diberhentikan secara tidak hormat oleh Pemkab Karanganyar.

(Lim)-d